

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai politik yang berorientasi pada anak muda dan progresivisme di Indonesia. Didirikan pada tahun 2014, PSI berupaya menjadi wadah bagi generasi milenial dan zilenial dalam dunia politik. Sejak awal, PSI berambisi untuk menembus parlemen dengan menawarkan gagasan politik antikorupsi, toleransi, dan keberpihakan pada kelompok marjinal. Namun, Pemilu 2024 menjadi pukulan berat bagi PSI, di mana partai ini kembali gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. PSI hanya mampu memperoleh 2,8% suara atau sekitar 4.260.169 suara sah, sehingga tidak dapat meloloskan wakilnya ke DPR RI. Ini merupakan kegagalan kedua PSI dalam upaya menembus parlemen setelah sebelumnya juga tidak lolos pada Pemilu 2019.

Kegagalan PSI dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, PSI menghadapi tantangan dalam membangun soliditas internal serta menghadapi kritik terhadap gaya politiknya yang dianggap terlalu elitis dan konfrontatif dan bergantung pada figur Jokowi. Selain itu, dinamika kepemimpinan dan strategi kampanye yang kurang efektif juga menjadi faktor yang menghambat daya tarik PSI di mata pemilih.

Selain faktor internal, kegagalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang mempersempit peluang partai-partai baru atau kecil untuk bersaing secara efektif. Salah satu faktor utama adalah dominasi partai-partai besar dalam sistem multi partai di Indonesia. Dengan sumber daya yang lebih besar, jaringan yang lebih luas, dan basis pemilih yang sudah terbentuk, partai-partai besar seperti PDI-P, Golkar, dan Gerindra mampu menguasai arena politik dan mempertahankan dominasi mereka di parlemen.

ini membuat ruang gerak bagi partai-partai baru, termasuk PSI, semakin terbatas dalam menarik perhatian pemilih dan memperoleh suara yang cukup untuk lolos ke DPR. Selain itu, segmentasi pemilih juga menjadi tantangan bagi PSI.

Sebagai partai yang menargetkan pemilih muda dan kelompok progresif, PSI harus bersaing dengan partai-partai lain yang juga mengincar segmen yang sama. Preferensi pemilih muda yang cenderung cair dan kurang loyal terhadap satu partai membuat PSI sulit mempertahankan dukungan yang stabil. Di sisi lain, basis pemilih tradisional yang lebih loyal terhadap partai-partai besar tetap menjadi kekuatan dominan dalam pemilu, sehingga menyulitkan PSI dalam memperluas jangkauan pemilihnya.

Faktor eksternal lainnya adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% yang dianggap terlalu tinggi bagi partai-partai baru atau kecil. Dengan aturan ini, partai yang memperoleh suara di bawah ambang batas tidak bisa menempatkan wakilnya di DPR, meskipun memperoleh jutaan suara sah. Dalam kasus PSI, meskipun mengalami peningkatan suara dibandingkan Pemilu 2019, hasil yang diperoleh masih belum cukup untuk menembus batas parlemen. Ambang batas yang tinggi ini secara tidak langsung memperkuat oligopoli politik partai-partai besar dan mempersempit peluang partai baru untuk berkembang. Dengan berbagai faktor eksternal ini, kegagalan PSI dalam Pemilu 2024 tidak hanya disebabkan oleh kelemahan internal partai, tetapi juga oleh dinamika sistem politik yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang setara bagi partai-partai baru atau kecil untuk bersaing dalam pemilu.

Teori otoritas karismatik yang dikemukakan oleh Max Weber digunakan penulis dalam menganalisis kegagalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai parlemen pada Pemilu 2024. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana PSI sangat bergantung pada figur Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai simbol kekuatan politiknya, serta bagaimana ketergantungan ini berkontribusi terhadap kegagalan PSI dalam mencapai ambang batas parlemen.

Teori sistem kepartaian digunakan penulis karena memiliki relevansi yang signifikan dalam menganalisis kegagalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai parlemen pada Pemilu 2024. Dalam konteks penelitian ini, teori sistem kepartaian digunakan untuk memahami bagaimana struktur kompetisi politik dalam

sistem multi partai di Indonesia mempengaruhi peluang partai-partai baru atau kecil, seperti PSI, dalam mencapai ambang batas parlemen.

5.2 Saran

Dalam menghadapi kegagalan untuk menjadi partai parlemen pada Pemilu 2024, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek internal maupun eksternal yang berkontribusi pada hasil tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan landasan bagi PSI untuk meningkatkan kinerjanya dan meraih kesuksesan pada pemilu berikutnya.

Pertama, PSI perlu memperkuat strategi kampanye dengan lebih fokus pada segmentasi pemilih yang lebih luas, bukan hanya pemilih muda atau kelompok tertentu dan tidak bergantung pada figur. Meskipun PSI memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan perempuan dan pemuda, hal ini tidak cukup untuk menarik perhatian seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, PSI disarankan untuk menyesuaikan pesan politik yang lebih inklusif dan relevan bagi berbagai kelompok usia, profesi, serta suku dan agama yang ada di Indonesia. Kedua, terkait dengan keberadaan struktur organisasi, PSI perlu memperkuat pengelolaan dan pengembangan kader serta aktivis yang ada di daerah. Membangun jaringan yang solid di tingkat lokal sangat penting agar partai ini dapat lebih diterima di berbagai wilayah. Penguatan basis massa melalui pembentukan komunitas lokal yang lebih solid akan membantu meningkatkan daya tarik PSI sebagai partai yang mewakili aspirasi rakyat di seluruh Indonesia.